

KEBIJAKAN POLITIK LUAR NEGERI FILIPINA TENTANG LAUT CINA SELATAN PADA MASA PEMERINTAHAN RODRIGO DUTERTE

Oleh :

JENNIFER BEATRICE G. P.

(Alumni Departemen Hubungan Internasional Fisip Universitas Hasanuddin)

Abstract

This research aims to describe the Philippine's foreign policy, especially in regarding to the South China Sea, that under the administration of President Rodrigo Duterte, the foreign policy show an alteration from the previous administration. The method of this research is analytical descriptive that aims to describe the facts about the Philippine's foreign policy under the administration of President Rodrigo Duterte. Technique of data collection that used by the writer is the method that based on documents and internet, or usually known as library research, taken from many literatures, such as books, journals, articles, newsletters, and internet, that related to this research. In this research, the writer also use qualitative technique of data analysis, that analyze background and the shape of the Philippine's foreign policy under the administration of President Rodrigo Duterte, about the South China Sea.

The result of this research shows that President Rodrigo Duterte in his foreign policy, act cooperatively toward the People's Republic of China, regarding to the conflict in the South China Sea. Another shape of the Philippine's foreign policy under the administration of President Rodrigo Duterte, especially about South China Sea, is oriented to the interest of the economy. Beside that, the change of the Philippine's foreign policy aims to keep the stabilization of the region around the South China Sea and fulfill the Philippine's national interest, also become a country that not depend on other country, then President Rodrigo Duterte acts cooperatively with the People's Republic of China and take advantage in every opportunities to build relation with every country, to fulfill national interest of the Philippine's, especially in economic sector.

Key words: *The Philippine's Foreign Policy, Rodrigo Duterte, South China Sea*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan kebijakan politik luar negeri Filipina pada masa pemerintahan Rodrigo Duterte, khususnya tentang Laut Cina Selatan. Di mana, pada masa pemerintahan Presiden Rodrigo Duterte, kebijakan politik luar negeri Filipina mengalami perubahan dari kebijakan pada pemerintahan Presiden sebelumnya. Metode penelitian yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah metode analisis deskriptif, yang bertujuan untuk menggambarkan fakta-fakta tentang kebijakan politik luar negeri Filipina pada masa pemerintahan Rodrigo Duterte. Teknik pengumpulan data yang digunakan penulis adalah metode berbasis dokumen dan internet, atau yang lebih dikenal dengan metode telaah pustaka (*library research*), yang bersumber dari berbagai literatur, seperti buku-buku, jurnal-jurnal, artikel, surat kabar harian, dan

internet yang terkait dengan permasalahan dalam penelitian ini. Dalam penelitian ini, penulis juga menggunakan teknik analisis data kualitatif, yang menganalisa latar belakang dan bagaimana wujud kebijakan politik luar negeri Filipina pada masa pemerintahan Rodrigo Duterte tentang Laut Cina Selatan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Presiden Rodrigo Duterte dalam kebijakan politik luar negerinya, lebih bersikap kooperatif daripada konfrontatif terhadap RRT, dalam menangani konflik Laut Cina Selatan. Wujud lain dari kebijakan politik luar negeri Filipina pada masa pemerintahan Rodrigo Duterte, khususnya mengenai Laut Cina Selatan, adalah berorientasi pada kepentingan ekonomi. Selain itu, perubahan kebijakan politik luar negeri Filipina dimaksudkan untuk menjaga stabilitas kawasan sekitar Laut Cina Selatan dan mewujudkan kepentingan nasional Filipina, serta menjadi negara yang mandiri, maka Presiden Rodrigo Duterte mengambil langkah untuk bertindak secara kooperatif dengan RRT dan memanfaatkan setiap kesempatan yang ada untuk membangun hubungan dengan negara mana saja, demi kepentingan nasional Filipina, khususnya dalam bidang ekonomi.

Kata Kunci: *Kebijakan Politik Luar Negeri Filipina, Rodrigo Duterte, Laut Cina Selatan.*

PENDAHULUAN

Negara yang merdeka dan berdaulat akan menjalankan kebijakan politik luar negerinya dalam dunia internasional. Kebijakan politik luar negeri suatu negara mencerminkan kepentingan nasional negara tersebut. Dalam kaitannya dengan kepentingan nasional, kebijakan politik luar negeri suatu negara diharapkan dapat memperjuangkan kepentingan nasional negaranya dengan tepat. Hal tersebut tidak terlepas dari peran pemerintahan yang berkuasa dalam negara tersebut.

Filipina sebagai negara yang merdeka dan berdaulat ikut aktif dalam kancah politik internasional melalui politik luar negerinya. Filipina telah melewati perjalanan panjang dalam politik luar negerinya yang merupakan cerminan dari kepentingan nasionalnya. Kepentingan nasional Filipina tidak lepas dari sejarah panjang negara Filipina sejak semula. Filipina yang pernah berada di bawah kekuasaan Amerika Serikat, masih membawa pengaruh nilai-nilai Amerika Serikat yang tertanam sejak dahulu. Kecenderungan politik luar negeri Filipina pun banyak dipengaruhi oleh warisan kolonial Amerika Serikat.

Berbeda dengan hubungan Filipina dan Amerika Serikat, hubungan antara Filipina dan Republik Rakyat Tiongkok (RRT) cenderung kurang baik dan seringkali diwarnai dengan ketegangan di antara keduanya. Hubungan Filipina dan RRT seringkali memburuk diakibatkan oleh perebutan wilayah Laut Cina Selatan, yang melibatkan RRT dan 4 negara di Asia Tenggara, yaitu Malaysia, Vietnam, Brunei, serta Filipina.

Laut Cina Selatan merupakan sebuah perairan di dunia yang memiliki potensi yang sangat besar, karena kaya akan minyak bumi, gas alam, dan sumber daya laut lainnya, yang menjadi kebutuhan setiap negara di dunia. Laut Cina Selatan juga memiliki nilai yang sangat strategis, karena merupakan jalur perdagangan dunia internasional. Hal ini menyebabkan negara-negara di sekelilingnya berusaha mendapatkan hak kedaulatan atas wilayah yang masing-masing di klaim oleh negara-negara tersebut. Hal ini jugalah yang kemudian memicu terjadinya klaim tumpang tindih dan konflik di antara negara-negara yang bersangkutan, termasuk Filipina dan RRT.

Hubungan Filipina dan RRT memburuk pada 6 tahun belakangan ini, yaitu pada masa pemerintahan mantan Presiden Benigno Aquino III, dikarenakan konflik Laut Cina Selatan tersebut. Mantan Presiden Benigno Aquino III, pada masa pemerintahannya, kemudian membawa konflik ini ke Pengadilan Arbitrase Internasional, yang berbasis di Den Haag, Belanda. Hal itu memicu kemarahan Pemerintah RRT yang lebih memilih untuk menyelesaikan perselisihan dengan diskusi bilateral.

Sebagai hasilnya, pada akhir masa pemerintahan mantan Presiden Benigno Aquino III di tahun 2016, Mahkamah Arbitrase Internasional menyatakan bahwa RRT telah melanggar kedaulatan Filipina di Laut Cina Selatan, yang kemudian menambah kemarahan RRT. RRT bersikeras tidak menyetujui keputusan tersebut dan meminta Filipina melakukan perundingan secara langsung dengan RRT.¹

Akan tetapi, memasuki masa pemerintahan Presiden Rodrigo Duterte, sebagai Presiden Filipina yang ke-16, Filipina menunjukkan kebijakan yang berbeda terkait konflik Laut Cina Selatan ini. Presiden Rodrigo Duterte menempuh jalur yang lebih bersifat damai, dengan mengatakan akan membicarakan konflik Laut Cina Selatan secara bilateral dengan RRT. Presiden Rodrigo Duterte tidak ingin menyelesaikan konflik ini melalui pengadilan internasional. Hal ini menunjukkan titik awal perubahan kebijakan politik luar negeri Filipina pada masa pemerintahan Presiden Rodrigo Duterte.

Dalam hal kebijakan politik luar negerinya, Filipina merupakan negara yang sangat bergantung pada peran Presiden sebagai pembuat keputusan dan kebijakan. Pengaruh kepemimpinan dalam perumusan kebijakan politik luar negeri merupakan hal yang sangat penting dan menentukan arah kebijakan politik luar negeri Filipina selanjutnya. Kepribadian, pengalaman, dan pengetahuan sang Presiden akan mempengaruhi keputusan dan kebijakan yang diambilnya.

¹ Pars Today. *Pemerintahan Baru Filipina dan Tantangannya*. 2016. Terdapat dalam <http://parstoday.com/id/radio/world-i14899-pemerintahan-baru-filipina-dan-tantangannya>. Diakses pada 1 Desember 2016.

Filipina menghadapi fase baru dalam politik luar negerinya dengan terjadinya pergantian pemerintahan dari Benigno Aquino III ke Rodrigo Duterte sebagai presiden Filipina yang baru. Kebijakan politik luar negeri Filipina pada masa pemerintahan Presiden Rodrigo Duterte memiliki arah dan tujuan yang semuanya mengarah kepada kesejahteraan rakyat yang dipimpinnya, serta kemajuan negaranya. Presiden Rodrigo Duterte mengutamakan kepentingan nasional negaranya dan menggaris bawahi beberapa permasalahan domestiknya yang perlu diatasi dengan segera karena dianggap telah menyusahkan negara Filipina.

Salah satu kebijakan politik luar negeri Filipina saat ini adalah membangun hubungan yang baik dengan RRT dan berusaha terlepas dari kebergantungan politik luar negeri terhadap Amerika Serikat. Hal ini merupakan langkah awal kebijakan politik luar negeri Presiden Rodrigo Duterte yang mencolok dan berbalik arah dari pendahulunya.² Selain itu, Presiden Rodrigo Duterte juga melakukan peralihan orientasi kebijakan politik luar negeri Filipina yang menjauhi Amerika Serikat, dengan mengusir tentara Amerika Serikat yang melakukan pelatihan di Mindanao, serta berusaha menjauhkan Amerika Serikat dari sengketa teritorial tersebut.³

Perubahan kebijakan yang terjadi di Filipina, tidak lepas dari pengaruh kepemimpinan dalam pembentukan kebijakan domestik maupun politik luar negeri. Pergantian pemimpin negara membuat berbagai perubahan terjadi dalam negara tersebut, demikian juga dalam konflik Laut Cina Selatan. Pengaruh pemimpin negara dalam pembentukan kebijakan sangatlah penting. Karakter dari seorang pemimpin dapat menentukan gaya kepemimpinannya dan kebijakan-kebijakan yang diambilnya. Oleh karena itu, pergantian kepemimpinan dapat merubah orientasi kebijakan di suatu negara, baik dalam maupun luar negeri.

Dari kepemimpinan Presiden Rodrigo Duterte sebagai Presiden Filipina, dapat terlihat transisi kebijakan politik luar negeri yang sangat berbeda jauh, bahkan bertolak belakang dengan pendahulunya, mantan Presiden Benigno Aquino III. Hal ini tentu dipengaruhi oleh kepribadian Presiden Rodrigo Duterte itu sendiri, dan juga faktor-faktor eksternal yang mempengaruhi kebijakan politik luar negerinya. Sikap Presiden Duterte yang lebih kooperatif namun tetap tegas, menjadi permulaan baru bagi hubungan Filipina dan RRT, terkhususnya dalam penyelesaian konflik klaim tumpang tindih Laut Cina Selatan.

Kebijakan politik luar negeri Filipina pada masa pemerintahan Presiden

² Rene L. Pattiradjawane. *Dilema Keamanan Maritim: Protokol CUES Ubah Status Laut Selatan*. Harian Kompas. 03 Oktober 2016. Hal. 10.

³ Deutsche Welle. *Filipina Tinggalkan ASEAN dan Mendekat ke Cina*. 2016. Terdapat dalam <http://www.dw.com/id/filipina-tinggalkan-asean-dan-mendekat-ke-cina/a-19297934>. Diakses pada 22 Desember 2016.

Rodrigo Duterte, melakukan berbagai pendekatan-pendekatan dengan RRT, termasuk dalam penyelesaian sengketa Laut Cina Selatan. Berbeda dengan kebijakan politik luar negeri Filipina sebelumnya, pada masa pemerintahan Benigno Aquino III, yang bersifat kompetitif dan bertentangan dengan RRT, hingga memperburuk hubungan kedua negara. Hal ini menunjukkan, peran Presiden dalam berlangsungnya kebijakan politik luar negeri, khususnya di Filipina, sangatlah penting.

GAMBARAN UMUM

A. Kebijakan Politik Luar Negeri Presiden Rodrigo Duterte

Memasuki masa pemerintahan yang baru, Filipina dipimpin oleh Presiden Rodrigo Duterte, sebagai Presiden Filipina ke-16, yang memulai kebijakan-kebijakan yang berbeda dari yang sebelumnya. Hal yang dapat dilihat, bahwa kebijakan setiap periode pemerintahan akan berbeda dan terus mengalami perubahan, karena gagasan, pemikiran dan juga kepribadian masing-masing pemimpin juga berbeda. Selain itu, kebijakan politik luar negeri Filipina juga terbentuk berdasarkan keadaan atau situasi negara pada saat tertentu, serta dipengaruhi oleh tindakan atau kebijakan negara lain yang berhubungan dengan Filipina.

Kebijakan politik luar negeri Filipina yang selama ini dijalankan memiliki korelasi dengan persoalan domestik Filipina, seperti yang terjadi pada negara-negara lain. Kebijakan politik luar negeri Filipina terbentuk berdasarkan kepentingan nasional Filipina, yang meliputi faktor-faktor penting, yaitu faktor ekonomi, faktor sejarah sosial, dan juga faktor keamanan atau militer.

Kebijakan politik luar negeri Filipina pada masa pemerintahan Presiden Rodrigo Duterte merupakan kebijakan yang lahir dari kepentingan nasional Filipina, yang dirumuskan dalam kebijakan domestiknya. Pada kebijakan domestik Filipina, salah satu kebijakan yang menjadi perhatian dan sorotan dunia yaitu, Presiden Rodrigo Duterte berusaha untuk membersihkan negaranya dari kasus narkoba dengan menggunakan sanksi tegas kepada orang-orang yang terlibat narkoba, yaitu hukuman mati.

Ribuan orang telah meninggal dunia karena sanksi tegas tersebut. Sepertiga dari tersangka kasus narkoba itu tewas di tangan polisi, dan sisanya dibunuh penyerang tak dikenal.⁴ Presiden Rodrigo Duterte melakukan berbagai cara untuk menuntaskan kejahatan dan tindakan kriminal di negerinya.

Kebijakan yang dijalankan oleh Presiden Rodrigo Duterte ini memicu kecaman internasional, termasuk PBB dan Parlemen Uni Eropa, karena dinilai berlebihan dan melanggar hak asasi manusia.⁵ Secara khusus, Amerika Serikat

⁴ Harian Kompas. *Manila Tolak Intervensi Dunia*. 26 September 2016. Hal. 9.

⁵ Ibid.

sebagai negara aliansi selama bertahun-tahun, menyampaikan pendapatnya terkait kebijakan domestik Filipina ini. Pada masa pemerintahan Presiden Barrack Obama, Amerika Serikat ikut mengemukakan kebijakan Presiden Rodrigo Duterte ini yang dinilai tidak memperhatikan nilai-nilai kemanusiaan. Namun, Presiden Rodrigo Duterte tidak mau berkompromi dan tidak mau tunduk pada tekanan internasional.

Hal ini kemudian menyebabkan timbulnya pandangan negatif Presiden Rodrigo Duterte terhadap negara-negara Barat, tanpa terkecuali Amerika Serikat. Hal ini semakin memburuk karena Amerika Serikat memutuskan untuk melakukan embargo senjata ke Filipina, karena Filipina dianggap melanggar hak asasi manusia.⁶ Presiden Rodrigo Duterte kemudian menyatakan ingin mengakhiri kebijakan politik luar negeri Filipina yang selama ini sangat bergantung kepada Amerika Serikat dan menyatakan bahwa Filipina telah menjalin kembali aliansinya dengan arus ideologi Tiongkok.⁷

Selain itu, kebijakan politik luar negeri Filipina juga lahir dari kepentingan nasional Filipina terkait kehidupan para rakyat Filipina yang juga bergantung pada Laut Cina Selatan, atau yang mereka sebut dengan *West Philippine Sea*. Ketegangan yang terjadi beberapa waktu sebelum Presiden Rodrigo Duterte menjabat, menimbulkan kekhawatiran. RRT yang tetap bersikeras tidak mengakui keputusan Mahkamah Arbitrase Internasional dikhawatirkan akan menggunakan *power*-nya, termasuk dalam bidang militer untuk mencapai apa yang diinginkannya. Hal ini tentu akan mengancam stabilitas kawasan yang justru malah merugikan Filipina, bahkan negara-negara di Asia Tenggara lainnya.

Kemudian, Presiden Rodrigo Duterte berusaha mencairkan ketegangan antara Filipina dengan RRT, yang sebelumnya sempat memanas setelah Filipina, di bawah pemerintahan mantan Presiden Benigno Aquino III, membawa konflik Laut Cina Selatan ke Mahkamah Arbitrase Internasional dan dimenangkan oleh Filipina. Presiden Rodrigo Duterte memilih untuk membicarakannya secara bilateral dengan RRT dan menggunakan pendekatan-pendekatan yang lebih kooperatif dalam menangani kasus terkait Laut Cina Selatan.

Keputusan Mahkamah Arbitrase Internasional, terkait klaim tumpang tindih Filipina dan RRT di Laut Cina Selatan, menyatakan kemenangan di pihak Filipina, berdasarkan UNCLOS 1982. Filipina menghormati keputusan yang bersejarah ini sebagai sebuah kontribusi yang penting dalam penyelesaian konflik Laut Cina Selatan yang terus menerus dilakukan. Filipina terus mengupayakan penyelesaian konflik Laut Cina Selatan dengan damai, dengan

⁶ Harian Kampus. *Duterte Caci AS Soal Penjualan Senjata*. 04 November 2016. Hal. 9.

⁷ Benny D. Koestanto. *Pernyataan Keras Sang Presiden*. 23 Oktober 2016. Hal. 3.

mempromosikan dan meningkatkan perdamaian dan kestabilan dalam kawasan.⁸ Akan tetapi, Filipina tidak akan mengesampingkan keputusan yang bersejarah yang diberikan oleh Mahkamah Arbitrase Internasional (*Permanent Court of Arbitration*).⁹

Selanjutnya, untuk melanjutkan metode pendekatan yang baru dengan RRT, Presiden Rodrigo Duterte mengadakan kunjungan ke RRT, dalam sebuah forum bisnis. Presiden Rodrigo Duterte datang dengan misi untuk menjaga kedamaian dan kestabilan kawasan melalui hubungan yang baik antara kedua negara yang berdaulat. Presiden Rodrigo Duterte bertujuan untuk dapat menjalin hubungan politik, ekonomi, dan budaya yang lebih dekat dengan RRT.¹⁰

Presiden Rodrigo Duterte ingin menjalin hubungan yang baik dengan RRT dengan mengoptimalkan keuntungan yang lebih besar dan memaksimalkan potensi jangka panjang, mengingat RRT adalah sumber perdagangan impor terbesar, partner perdagangan terbesar kedua, sumber turis, dan pasar ekspor terbesar ketiga bagi Filipina.¹¹

Berdasarkan hal tersebut, dapat dilihat bahwa dasar dari kebijakan politik luar negeri Filipina pada masa pemerintahan Presiden Rodrigo Duterte adalah kepentingan ekonomi dan juga keamanan nasional, khususnya menjaga stabilitas kawasan yang menyangkut Laut Cina Selatan. Presiden Rodrigo Duterte menyadari bahwa RRT dapat memberikan investasi, khususnya dalam faktor infrastruktur, yang sangat dibutuhkan Filipina sebagai salah satu negara kepulauan di kawasan Asia Tenggara.

Selain itu, yang berpengaruh dalam terbentuknya kebijakan politik luar negeri Presiden Rodrigo Duterte adalah kritik yang muncul dari Amerika Serikat mengenai kebijakan domestiknya dalam usaha memberantas kasus narkoba yang merajalela di Filipina. Kritik tersebut menjadi daya pendorong yang lebih jauh bagi Filipina untuk menolak pengaruh Amerika Serikat, seperti yang dikatakan oleh Carl Baker, direktur program *U.S. think tank CSIS Pacific Forum*: *"He believes that establishing stronger ties with China and Russia will give him*

⁸ Documents on The West Philippine Sea. Statement of the Secretary of Foreign Affairs. 12 Juli 2016. Terdapat dalam <http://www.dfa.gov.ph/documents-on-the-west-philippine-sea>. Diakses pada 30 Januari 2017.

⁹ Patricia Lourdes Viray. *Yasay Reiterates: Duterte will not Deviate from Tribunal Ruling on South China Sea*. Terdapat dalam <http://www.philstar.com/headlines/2016/12/19/1654964/yasay-reiterates-duterte-will-not-deviate-tribunal-ruling-south-china-sea#dMI02yJcWUKvsHoY.99>. Diakses pada 31 Januari 2017.

¹⁰ *Statement of Secretary Perfecto R. Yasay Jr: Praying for Success in the President's China Visit*. Terdapat dalam <http://www.dfa.gov.ph/newsroom/phl-embassies-and-consulates-news/10695-statement-of-secretary-perfecto-r-yasay-jr-on-the-president-s-china-visit>. Diakses pada 30 Januari 2017.

¹¹ Aaron Rabena. *What a Duterte Government Means for Sino-Philippine Relations*. Terdapat dalam <http://www.rappler.com/views/imho/135568-duterte-government-china-philippines-relations>. Diakses pada 31 Januari 2017.

greater freedom to ignore U.S. demands regarding defense priorities."¹² Presiden Rodrigo Duterte menginginkan iklim yang mendukungnya dalam menjalankan kebijakannya, yang kemudian dilakukan oleh RRT yang memberikan dukungan dan bantuan kepada pemerintah Filipina.

Selain kepentingan dan keamanan nasional, faktor lain yang mendasari kebijakan politik luar negeri Filipina adalah kepribadian dari Presiden Rodrigo Duterte itu sendiri. Kepribadian Presiden Rodrigo Duterte sekarang ini terbentuk karena sejarah sosialnya dan juga pengalaman-pengalamannya. Presiden Rodrigo Duterte menjabat sebagai walikota Davao selama 22 tahun berturut-turut sebelum ia mengikuti pemilihan presiden 2016.

Kebijakan politik luar negeri Filipina pada masa pemerintahan Presiden Rodrigo Duterte dirumuskan dengan memiliki arah dan tujuan yang berfokus kepada kesejahteraan rakyat yang dipimpinnya, serta kemajuan negaranya. Presiden Rodrigo Duterte mengedepankan kepentingan nasional negaranya dan menggaris bawahi beberapa permasalahan domestiknya yang perlu diatasi dengan segera, yang selama ini cukup menyusahkan negara Filipina, yaitu dengan menekankan pada pemberantasan masalah korupsi, kriminalitas di jalan-jalan, dan perdagangan narkoba yang merajalela, yang harus segera diatasi.¹³ Presiden Rodrigo Duterte juga ingin menegakkan hukum yang seadil-adilnya, yang selama ini dinilai telah melemah karena tingginya angka korupsi, kriminalitas, dan perdagangan narkoba.

Kebijakan politik luar negeri Filipina pada masa pemerintahan Presiden Rodrigo Duterte bersifat independen. Tujuannya adalah untuk menyeimbangkan kekuatan dari aliansi lama Filipina, yaitu Amerika Serikat dengan negara-negara berkekuatan besar lainnya, seperti RRT, Jepang, dan Rusia.¹⁴ Kebijakan independen juga berarti Filipina tidak ingin lagi bergantung pada kebijakan politik luar negeri negara lain, seperti yang terjadi sebelumnya, dimana Filipina bergantung pada Amerika Serikat dalam pelaksanaan politik luar negerinya.

Presiden Rodrigo Duterte juga menjalankan *multi-country foreign policy*, termasuk melalui konflik Laut Cina Selatan. Filipina meyakini bahwa hubungan yang baik dengan semua negara, mendatangkan keuntungan, bahkan lebih banyak lagi, daripada hanya berpihak atau bergantung pada salah satu negara. Kebijakan politik luar negeri Filipina yang independen bertujuan untuk mendapatkan keuntungan dari hubungan-hubungan yang dijalin bersama negara-negara *super power* tersebut. Selain itu, sikap Filipina terhadap negara-

¹² Ibid.

¹³ Inaugural Address of Presiden Rodrigo Roa Duterte. Delivered at The Riza Hall, Malacanang Palace, 30 Juni 2016.

¹⁴ Ralph Jennings. *The One Real Foreign Policy Goal of Today's Volatile Philippine*. Terdapat dalam www.forbes.com/sites/ralphjennings/2016/11/3/philippine-presidents-real-foreign-policy-goal/#19ffacbe60b0. Diakses pada 31 Januari 2017.

negara lain bergantung pada respon negara-negara tersebut dalam mendukung kebijakan-kebijakan Filipina. Jelas yang dimaksud adalah Filipina menginginkan iklim yang mendukung kebijakan-kebijakannya.

Kemudian, mengenai isu Laut Cina Selatan, Presiden Rodrigo Duterte menyatakan tidak ingin menyelesaikannya melalui jalur pengadilan internasional. Presiden Rodrigo Duterte menekankan bahwa ia tidak akan berperang melawan RRT dan dengan rela untuk mengeksplor minyak dan gas di Laut Cina Selatan dengan RRT melalui *joint ventures* dan menyambut RRT untuk meningkatkan infrastruktur Filipina.¹⁵

Berdasarkan hal tersebut, dapat dilihat bahwa kebijakan politik luar negeri Filipina pada masa pemerintahan Presiden Rodrigo Duterte juga mengarah kepada pembangunan negara, dalam hal ini adalah perbaikan dan pembangunan infrastruktur. Hal ini menunjukkan salah satu permasalahan domestik Filipina adalah kurangnya modal untuk pembangunan, yang menyebabkan masih banyak terdapat pengangguran dan juga infrastruktur yang kurang. Sehingga, mantan Presiden Filipina, Benigno Aquino III, mengambil keputusan akhir pada masa pemerintahannya yaitu bergabung dengan *the Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB)*.¹⁶

Dapat dilihat bahwa, tujuan kebijakan Presiden Rodrigo Duterte berfokus pada perubahan yang nyata, demi kepentingan rakyatnya, baik itu di dalam maupun luar negeri. Kebijakan-kebijakan yang dijalankan Presiden Rodrigo Duterte menitikberatkan kepada penyelesaian suatu masalah, yang hasilnya benar-benar terlihat secara nyata, dan yang juga menguntungkan negara Filipina. Misalnya dalam penyelesaian konflik Laut Cina Selatan, Presiden Rodrigo Duterte memilih menyelesaikannya dengan negosiasi bilateral dengan RRT, karena cara itulah yang dianggap dapat menghasilkan solusi yang lebih baik, sekaligus menguntungkan bagi Filipina.

B. Laut Cina Selatan

Laut Cina Selatan (*South China Sea*) adalah bagian dari samudera Pasifik dan merupakan perairan yang sangat luas yang meliputi pulau-pulau dan karang-karang. Laut Cina Selatan terletak di jantung Asia Tenggara dan menjadi rute penting untuk transportasi laut dan udara mancanegara. Laut Cina Selatan juga memiliki potensi yang sangat besar karena banyaknya persediaan sumber daya alam di dalamnya.

Akan tetapi, Laut Cina Selatan juga menjadi *flashpoint* di kawasan Asia

¹⁵ Pia Ranada. *Duterte Open to Joint Exploration with China in West PH Sea*. Rappler. 05 Februari 2016. Terdapat dalam Ju Hailong. 2016. *Will Duterte Overturn His Predecessor's Legacy?*. Terdapat dalam China International Studies July/August 2016 hal. 12.

¹⁶ Ju Hailong. 2016. *Will Duterte Overturn His Predecessor's Legacy?*. Terdapat dalam China International Studies July/August 2016 hal. 13.

Tenggara, yaitu sumber konflik yang sewaktu-waktu dapat memicu terjadinya konflik antar negara yang bersangkutan. Hal ini disebabkan karena beberapa negara yang berbatasan langsung dengan wilayah perairan Laut Cina Selatan mengklaim wilayah negaranya masing-masing berdasarkan ketentuan ZEE. Sedangkan disisi lain, RRT juga mengklaim hampir 90 persen dari wilayah Laut Cina Selatan sebagai bagian dari wilayah kedaulatannya berdasarkan klaim historis. Sehingga, konflik klaim tumpang tindih menjadi hal yang tidak dapat dihindari.

Perdebatan dan klaim wilayah telah terjadi selama bertahun-tahun tanpa ada solusi yang jelas. Potensi Laut Cina Selatan yang sangat besar dan juga nilai strategis yang dimilikinya, yang menyebabkan negara-negara yang terkait berusaha mempertahankan bagian Laut Cina Selatan yang di klaimnya demi mencapai kepentingan nasional masing-masing negara, tanpa terkecuali Filipina dan RRT.

Laut Cina Selatan merupakan sebuah perairan di dunia yang memiliki potensi yang sangat besar, karena perairan ini kaya akan minyak bumi dan gas alam, serta sumber daya laut lainnya, yang sangat dibutuhkan oleh setiap negara. Potensi Laut Cina Selatan yang sangat besar ini menyebabkan negara-negara di sekelilingnya berusaha mendapatkan hak kedaulatan atas wilayah yang masing-masing di klaim negara-negara tersebut. Hal ini kemudian memicu terjadinya klaim tumpang tindih dan konflik di antara negara-negara yang bersangkutan.

Di Laut Cina Selatan juga terdapat empat kelompok gugusan kepulauan dan karang-karang, yaitu: Paracel, Spratly, Pratas, dan Kepulauan Maccalesfield. Meskipun konflik teritorial di Laut Cina Selatan tidak hanya mengenai Kepulauan Spratly dan Paracel, namun klaim multilateral atas Spratly dan Paracel lebih menonjol. Kepulauan Spratly merupakan gugusan pulau yang termasuk dalam kawasan Laut Cina Selatan, yang diklaim oleh enam negara, yaitu RRT, Taiwan, Vietnam, Malaysia, Brunei, dan Filipina. Sedangkan Kepulauan Paracel, dan juga Pratas, masing-masing secara efektif berada di bawah kendali RRT dan Taiwan.¹⁷

Kepulauan Spratly yang diklaim oleh enam negara tersebut memiliki landasan yang sangat kaya akan minyak dan gas, serta berbagai sumber daya laut lainnya. Ketersediaan minyak dan gas tersebut diperkirakan berkisar antara 1-2 milyar barrel sampai 225 milyar barrel. Estimasi yang lain juga menyebutkan, kandungan minyak di kawasan Laut Cina Selatan sebanyak 213 bbl (*billion barrels*),¹⁸ atau sekitar 10 kali lipat cadangan nasional yang dimiliki Amerika Serikat. Adapaun *EIA* menginformasikan, cadangan sumber daya alam yang terbesar di Laut Cina Selatan adalah gas alam, yang diperhitungkan sekitar

¹⁷ Prof. Dr. phil Poltak Partogi Nainggolan, M.A. 2013. *Konflik Laut China Selatan dan Implikasinya terhadap Kawasan*. Jakarta: P3DI Setjen DPR Republik Indonesia dan Azza Grafika. Hal. 116.

¹⁸ Ibid.

900 triliun kaki kubik, atau sama dengan cadangan minyak yang dimiliki Qatar.¹⁹ Kemudian, perkiraan menurut *U.S. Energy Information Administration (EIA)*, menunjukkan bahwa sekitar 60%-70% dari hidrokarbon di Laut Cina Selatan adalah gas. Sementara itu, penggunaan gas alam di wilayah ini diproyeksikan akan tumbuh sebesar 5% per tahun, selama dua dekade mendatang.²⁰

Selain berpotensi besar, Laut Cina Selatan juga memiliki nilai yang sangat strategis. Kawasan Laut Cina Selatan merupakan rute perkapalan atau ekspedisi utama di dunia.²¹ Diestimasikan bahwa setiap tahun, Laut Cina Selatan memfasilitasi pergerakan lebih dari setengah lalu lintas dari kapal pengangkut minyak.²²

Kawasan Laut Cina Selatan merupakan kawasan bernilai ekonomis, politis dan strategis yang sangat penting. Laut Cina Selatan berperan sangat penting sebagai jalur distribusi minyak dunia, perdagangan, dan pelayaran internasional. Oleh karena itu, kedaulatan atas gugusan pulau-pulau di Laut Cina Selatan selalu dipersengketakan selama bertahun-tahun. Hal ini dikarenakan kedudukannya yang strategis, yaitu sangat dekat dengan jalur komunikasi laut (SLOC) yang sangat vital dan sebagai jalur pelayaran perdagangan (SLOT), yang merupakan penghubung antara Samudera Hindia dan Samudera Pasifik.²³ Hal ini telah merubah jalur Laut Cina Selatan menjadi rute tersibuk di dunia, karena lebih dari setengah perdagangan dunia berlayar melewati Laut Cina Selatan setiap tahun.

Kawasan ini juga selalu dilewati oleh kapal-kapal berbagai jenis, yang mengangkut sumber energi minyak, batu bara, maupun gas alam, termasuk 70% kebutuhan energi Jepang dan 65% kebutuhan energi RRT. Selain itu, Amerika Serikat juga sangat membutuhkan kawasan ini untuk mendukung mobilitas pasukan militernya dalam melancarkan dominasi globalnya.²⁴

Menurut Profesor Jamie B. Naval dari *University Philippine Diliman (UPD)* Filipina, nilai ekonomi perdagangan yang melintasi Laut Cina Selatan per tahunnya mencapai 5,3 triliun USD.²⁵ Laut Cina Selatan juga menjadi jalur

¹⁹ *Sengketa Kepemilikan Laut Cina Selatan*. Terdapat dalam BBC Online. Diakses pada 12 Februari 2017.

²⁰ *South China Sea is a Critical World Trade Route and a Potential Source of Hydrocarbons*. EIA Overview. 07 Februari 2013. Terdapat dalam <http://www.eia.gov/countries/regions-topics.cfm?fips=sc>, diakses pada 12 Februari 2017.

²¹ Jon Lunn dan Arabella Lang. *The South China Sea Dispute: July 2016 Update*. Briefing Paper of House of Commons Library. No. 7481. Hal. 5.

²² Ibid.

²³ Prof. Dr. phil Poltak Partogi Nainggolan, M.A. 2013. *Konflik Laut China Selatan dan Implikasinya terhadap Kawasan*. Jakarta: P3DI Setjen DPR Republik Indonesia dan Azza Grafika. Hal. 117.

²⁴ Dr. Jean-Paul Rodrigue dan Dr. Theo Notteboom. *Global Maritime Routes and Chokepoints*. Terdapat dalam *The Geography of Transport System*, <http://people.hofstra.edu/geotrans/eng/ch1en/appl1en/ch1a2en.html>. Diakses pada 12 Februari 2017.

²⁵ *Nilai Seaborne Trade Laut Cina Selatan Capai 5,3 T Dolar AS Per Tahun*. 2016. *Jurnal Maritim, Indonesia Maritime Cognition*. Terdapat pada jurnalmaritim.com/2016/11/nilai-seaborne-trade-laut-china-selatan-capai-53-t-dolar-as-per-tahun/. Diakses pada 07 Februari 2017.

lintasan utama perdagangan dunia yang menjadi jembatan antara kawasan Asia Timur dan Asia Tenggara.

Karena itu, nilai strategis yang diperkirakan akan terus meningkat ini, akan menjadi hal yang mendapat perhatian bagi negara-negara dengan berbagai kepentingan, untuk dapat tetap mengambil keuntungan dari nilai strategis Laut Cina Selatan ini.

PEMBAHASAN

A. Kooperatif

Filipina memulai kembali babak baru dalam kebijakan politik luar negerinya pada masa pemerintahan Presiden Rodrigo Duterte. Presiden Rodrigo Duterte merumuskan kebijakan-kebijakan yang berbeda dari pendahulunya, yaitu mantan Presiden Benigno Aquino III, termasuk dalam kebijakan politik luar negerinya. Presiden Rodrigo Duterte menjalankan kebijakan politik luar negeri yang independen pada masa pemerintahannya. Dalam berbagai kesempatan, Presiden Rodrigo Duterte menjelaskan tidak ingin bergantung pada kebijakan politik luar negeri dari negara lain, termasuk dengan Amerika Serikat, yang selama ini beraliansi dengan Filipina.

Kebijakan politik luar negeri yang paling menjadi sorotan adalah kebijakan politik luar negeri Filipina terkait isu Laut Cina Selatan. Jika Benigno Aquino III menerapkan *hard-line foreign policy*, Presiden Rodrigo Duterte malah sebaliknya, menerapkan kebijakan-kebojakan politik luar negeri yang kooperatif dan bukan konfrontatif.

Presiden Rodrigo Duterte telah menunjukkan kebijakannya terhadap RRT dalam suatu pertemuan langsung antara RRT dan Filipina, ia mengatakan: *"I have a similar position as China's. I don't believe in solving the conflict through an international tribunal."*²⁶ Presiden Rodrigo Duterte tidak ingin menyelesaikan konflik tentang Laut Cina Selatan melalui pengadilan internasional. Meskipun demikian, Presiden Rodrigo Duterte tetap menghargai dan menerima hasil keputusan *PCA* tersebut sebagai keputusan yang penting dalam membantu penyelesaian konflik Laut Cina Selatan.

Pernyataan Presiden Rodrigo Duterte ini menunjukkan kecenderungan Presiden Rodrigo Duterte untuk bersikap lebih kooperatif dalam hubungan Filipina dengan RRT. Dengan menunjukkan kesamaan posisi untuk tidak menyelesaikan konflik melalui pengadilan internasional, Filipina berusaha menarik perhatian RRT dan menjadikan RRT kawan sekerja dalam berbagai bidang kerjasama, yang tentu saja mendatangkan keuntungan bagi negara Filipina.

²⁶ Ju Hailong. 2016. *Will Duterte Overturn His Predecessor's Legacy?* Terdapat dalam *China International Studies* July/August 2016. Hal. 9.

Hal yang penting yang diperhatikan Presiden Rodrigo Duterte juga mengenai kebijakan dalam negerinya dalam memberantas kejahatan transnasional di Filipina. Berbeda dengan respon Amerika Serikat, RRT malah mendukung kebijakan Filipina tersebut dalam upaya pemberantasan narkoba, dengan menawarkan bantuan militer, yang berupa peralatan militer gratis. Total peralatan militer tersebut senilai 14 juta dollar Amerika atau sekitar 188 miliar rupiah. Selain itu, RRT juga menawarkan pinjaman lunak jangka panjang senilai 500 juta dollar Amerika Serikat.²⁷

Dari hal tersebut, dapat dilihat bahwa kebijakan politik luar negeri RRT yang lunak terhadap Filipina tersebut merupakan produk dari kebijakan politik luar negeri Filipina yang dijalankan Presiden Rodrigo Duterte terkait isu Laut Cina Selatan. Tindakan Presiden Rodrigo Duterte yang kooperatif memicu kebijakan politik luar negeri RRT juga menggunakan cara-cara yang kooperatif dalam berhubungan dengan Filipina.

Kebijakan politik luar negeri yang kooperatif ini dapat menjadi kekuatan bagi Filipina untuk memenuhi kepentingan nasionalnya. Kebijakan yang kooperatif dapat membuat lawan menjadi kawan dan membawa keuntungan bagi Filipina. Hal ini yang diterapkan oleh Presiden Rodrigo Duterte dalam mengelola hubungannya dengan RRT, khususnya dalam isu Laut Cina Selatan. RRT akan menjadi lawan yang sangat membahayakan jika dihadapi dengan tindakan yang keras dan memaksa. Apalagi, RRT sebagai negara *superpower* dapat menggunakan kekuatan dan pengaruhnya untuk melawan Filipina, sebagai salah satu negara berkembang.

Dengan wujud kebijakan politik luar negeri yang kooperatif, Presiden Rodrigo Duterte mencari iklim yang dapat mendukung kebijakan yang ada di negaranya. RRT adalah negara yang mendukung tindakan Filipina dalam memberantas narkoba dan juga telah menawarkan bantuan senjata militer kepada Filipina terkait tindakan tersebut. Maka dari itu, Presiden Rodrigo Duterte memanfaatkan kesempatan hubungan dengan RRT ini dengan baik, dan kemudian meminta bantuan dari RRT terkait kasus Abu Syyaf di Filipina. Hal ini juga menunjukkan bahwa kebijakan politik luar negeri Presiden Rodrigo Duterte yang bersifat kooperatif terhadap RRT, khususnya mengenai kasus Laut Cina Selatan, membuka peluang-peluang kerjasama yang baru dan hubungan yang lebih mendalam dengan RRT, yang juga dapat memenuhi kebutuhan negara Filipina, contohnya saja dalam bidang ekonomi dan keamanan.

B. Orientasi Kepentingan Ekonomi

Tidak dapat dipungkiri bahwa faktor ekonomi merupakan faktor yang sangat penting dalam menjaga stabilitas suatu negara. Agenda ekonomi Filipina

²⁷ Harian Kompas. *Tiongkok Tawari Duterte Peralatan Militer Gratis*. 22 Desember 2016. Hal. 9.

pada masa pemerintahan Presiden Rodrigo Duterte masih tetap mengikuti prinsip kebijakan ekonomi pendahulunya, mantan Presiden Benigno Aquino III, dengan disertai penambahan-penambahan.

Terdapat kebutuhan ekonomi yang besar dalam negara Filipina, mengingat bahwa Filipina merupakan salah satu negara berkembang di kawasan Asia Tenggara, dan masih membutuhkan banyak modal untuk melakukan pembangunan dalam negerinya, khususnya dalam pembangunan infrastruktur yang layak dalam negerinya. Hal ini ditandai dengan keikutsertaan Filipina dalam *Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB)* yang merefleksikan kebutuhan negara Filipina yang besar terhadap modal dari RRT untuk pembangunan infrastruktur dalam negeri.²⁸

Kebijakan politik luar negeri Filipina pada masa pemerintahan Presiden Rodrigo Duterte menunjukkan preferensinya untuk mengadopsi pendekatan yang lebih pragmatis dalam hubungannya dengan negara-negara lain. Presiden Rodrigo meyakini bahwa hal ini akan menjadi pertanda yang baik bagi perkembangan sosial dan ekonomi Filipina selama enam tahun ke depan.

Dengan menggandeng RRT dalam berbagai kerjasama di berbagai bidang, Filipina dapat memanfaatkan iklim yang mendukung ini untuk memperbaiki perekonomian Filipina, yang menjadi kebijakan domestik dari Presiden Rodrigo Duterte.

Mengenai isu Laut Cina Selatan, *PCA* telah mengeluarkan keputusannya dengan berpihak kepada Filipina. Namun, Presiden Rodrigo Duterte memilih untuk mengambil pendirian yang lebih ramah atau bersahabat dengan RRT. Hal itu dilakukan Presiden Rodrigo Duterte sebagai usaha untuk menarik investasi dari RRT.²⁹ Dapat dilihat, bahwa kebijakan politik luar negeri Presiden Rodrigo Duterte mengenai Laut Cina Selatan juga didasarkan kepada kepentingan ekonomi Filipina.

Jika Filipina meneruskan tuntutanannya terhadap RRT terkait isu Laut Cina Selatan tersebut, maka Filipina kemungkinan akan kehilangan mitra dagang yang cukup membantu perekonomian Filipina dan memiliki potensi yang besar dalam memberikan modal pembangunan infrastruktur bagi Filipina. Tindakan Presiden Rodrigo Duterte ini membuahkan hasil. Setelah semua kemarahan RRT terkait hasil keputusan *PCA* tersebut, RRT menyatakan kembali bahwa RRT masih membuka kerjasama yang lebih besar dalam bidang ekonomi dengan Filipina.³⁰

²⁸ Ju Hailong. 2016. *Will Duterte Overturn His Predecessor's Legacy?* Terdapat dalam *China International Studies* July/August 2016. Hal. 13.

²⁹ Jon Lunn dan Steven Ayres. 2016. *The Philippines: September 2016 Update*. House of Commons Library. No. 7710. Hal. 11. Diunduh dari *Philippines Peace Process: Duterte Playing for High Stakes*. *The Interpreter*. 30 August 2016.

³⁰ *Ibid.*

Selain itu, Filipina tetap ingin menjalin hubungan yang baik dengan RRT karena Filipina menyadari bahwa Filipina belum mampu mengelola sumber energi yang terdapat pada Laut Cina Selatan tanpa bantuan dari negara lain yang memiliki kapabilitas yang lebih. Presiden Rodrigo Duterte seolah membiarkan keputusan *PCA* dan menukarkannya dengan modal dan teknologi dari RRT, serta kebebasan dari gangguan RRT. Pemerintahan Presiden Rodrigo Duterte mencoba untuk mengambil keuntungan dalam bidang ekonomi dari hasil keputusan *PCA* tersebut.

Selain itu, RRT juga dapat memberikan iklim yang nyaman bagi Filipina dengan dukungan-dukungan yang diberikan RRT terkait kebijakan domestik Filipina dalam memberantas narkoba, juga dengan menawarkan bantuan senjata, hal yang tidak dapat dilakukan oleh Amerika Serikat pada saat ini. Sehingga, Presiden Rodrigo Duterte membawa kebijakan politik luar negerinya untuk mendekat dengan RRT, agar kebijakan-kebijakan yang mewakili kepentingan nasional Filipina dapat terealisasi dengan baik.

Jadi, dapat dilihat bahwa kebutuhan mendasar suatu negara terletak juga pada kekuatan ekonomi yang dapat membuat suatu negara berjalan dengan baik. Modal, infrastruktur, teknologi, investasi, kerjasama ekonomi, adalah hal-hal yang dibutuhkan oleh Filipina saat ini. Termasuk dalam isu Laut Cina Selatan, sekalipun Filipina memenangkan kasus tersebut di Majelis Arbitrase Internasional, namun tanpa modal dan teknologi untuk mengembangkan wilayah yang diklaimnya tersebut, maka tidak akan mendatangkan keuntungan yang signifikan. Oleh sebab itu, Filipina memilih untuk menggandeng RRT dengan orientasi kepentingan ekonomi, namun tetap berhati-hati dalam pengambilan keputusan yang melibatkan negara tersebut.

PENUTUP

Kebijakan politik luar negeri Filipina memasuki era yang baru pada masa pemerintahan Presiden Rodrigo Duterte. Seorang Presiden, dapat menentukan kebijakan dan arah, serta tujuan politik luar negerinya, sesuai dengan konstitusi Filipina. Akan tetapi, kebijakan politik luar negeri Filipina menunjukkan ketergantungan yang sangat besar kepada keputusan Presiden, sehingga kepribadian dan nilai-nilai yang dianut Sang Presiden menjadi sangat berpengaruh pada kebijakan politik luar negeri Filipina. Secara khusus, mengenai kebijakan politik luar negeri Filipina tentang Laut Cina Selatan, yang merupakan kebijakan dari Presiden Rodrigo Duterte, yang juga dipengaruhi oleh nilai-nilai dan pengalaman-pengalaman yang dimilikinya, yang kemudian disesuaikan dengan kepentingan nasional negara Filipina,

Amerika Serikat dan RRT adalah dua negara yang selama ini merupakan sekutu dan seteru bagi Filipina. Dalam kaitannya dengan Laut Cina Selatan, Amerika Serikat adalah sekutu bagi Filipina, dan RRT adalah seterunya, sebagai

akibat dari klaim RRT yang menguasai kawasan Laut Cina Selatan, dimana Filipina juga memiliki kepentingan di dalamnya. Namun, masa kepemimpinan Presiden Rodrigo Duterte menempuh kebijakan baru, yaitu “berpisah dengan Amerika Serikat dan mendekat ke RRT.” Untuk mewujudkan kedekatan Filipina dengan RRT, Presiden Rodrigo Duterte melakukan pendekatan yang bersifat kooperatif dan berorientasi pada kepentingan ekonomi, yang disambut baik oleh RRT.

Sehubungan dengan fakta yang terjadi di Filipina tersebut, dimana, Presiden memiliki kekuasaan yang prerogatif dalam menentukan kebijakan dan orientasi politik luar negeri Filipina, namun tetap perlu melibatkan seluruh *stakeholder* yang ada dalam negeri Filipina, sehingga kebijakan yang ditempuhnya merepresentasikan kekuatan nasionalnya.

Kemudian, sebagai salah satu negara yang berada dalam kawasan Asia Tenggara dan merupakan salah satu anggota ASEAN, Filipina selayaknya juga mempertimbangkan kepentingan-kepentingan negara ASEAN lainnya, yang juga memiliki kepentingan serupa di Laut Cina Selatan dan bersengketa dengan RRT.

Akan tetapi, dalam mewujudkan kepentingannya, Filipina tidak mengutamakan kepentingan dirinya sendiri dalam hubungannya dengan RRT, terutama yang menyangkut kepentingan ekonomi. Akan tetapi, menyelaraskannya dengan kepentingan negara-negara ASEAN lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-buku:

Prof. Dr. phil Poltak Partogi Nainggolan, M.A. 2013. *Konflik Laut China Selatan dan Implikasinya terhadap Kawasan*. Jakarta: P3DI Setjen DPR Republik Indonesia dan Azza Grafika. Hal. 117.

Jurnal-jurnal:

Hailong, Ju. 2016. *Will Duterte Overturn His Predecessor's Legacy?* Terdapat dalam China International Studies July/August 2016.

Lunn, Jon dan Arabella Lang. *The South China Sea Dispute: July 2016 Update*. Briefing Paper of House of Commons Library. No. 7481.

Lunn, Jon dan Steven Ayres. 2016. *The Philippines: September 2016 Update*. House of Commons Library. No. 7710. Hal. 11. Diunduh dari *Philippines Peace Process: Duterte Playing for High Stakes*. The Interpreter. 30 August 2016.

Koran:

Benny D. Koestanto. *Pernyataan Keras Sang Presiden*. 23 Oktober 2016.

Harian Kompas. *Duterte Caci AS Soal Penjualan Senjata*. 04 November 2016.

Harian Kompas. *Manila Tolak Intervensi Dunia*. 26 September 2016.

Harian Kompas. *Tiongkok Tawari Duterte Peralatan Militer Gratis*. 22 Desember 2016.

Rene L. Pattiradjawane. *Dilema Keamanan Maritim: Protokol CUES Ubah Status Laut Selatan*. Harian Kompas. 03 Oktober 2016. Hal. 10.

Internet:

Deutsche Welle. *Filipina Tinggalkan ASEAN dan Mendekat ke Cina*. 2016. Terdapat dalam <http://www.dw.com/id/filipina-tinggalkan-asean-dan-mendekat-ke-cina/a-19297934>. Diakses pada 22 Desember 2016.

Documents on The West Philippine Sea. Statement of the Secretary of Foreign Affairs. 12 Juli 2016. Terdapat dalam <http://www.dfa.gov.ph/documents-on-the-west-philippine-sea>. Diakses pada 30 Januari 2017.

Dr. Jean-Paul Rodrigue dan Dr. Theo Notteboom. *Global Maritime Routes and Chokepoints*. Terdapat dalam The Geography of Transport System, <http://peo-ple.hofstra.edu/geotrans/eng/ch1en/appl1en/ch1a2en.html>. Diakses pada 12 Februari 2017.

Jennings, Ralph. *The One Real Foreign Policy Goal of Today's Volatile Philippine*. Terdapat dalam www.forbes.com/sites/ralphjennings/2016/11/3/philippine-presidents-real-foreign-policy-goal/#19ffacbe60b0. Diakses pada 31 Januari 2017.

Nilai Seaborne Trade Laut China Selatan Capai 5,3 T Dolar AS Per Tahun. 2016. Jurnal Maritim, *Indonesia Maritime Cognition*. Terdapat pada jurnalmaritim.com/2016/11/nilai-seaborne-trade-laut-china-selatan-capai-53-t-dolar-as-per-tahun/. Diakses pada 07 Februari 2017.

Pars Today. *Pemerintahan Baru Filipina dan Tantangannya*. 2016. Terdapat dalam <http://parstoday.com/id/radio/world-i14899-pemerintahan-baru-filipina-dan-tantangannya>. Diakses pada 1 Desember 2016.

Rabena, Aaron. *What a Duterte Government Means for Sino-Philippine Relations*. Terdapat dalam <http://www.rappler.com/views/imho/135568-duterte-government-china-philippines-relations>. Diakses pada 31 Januari 2017.

Sengketa Kepemilikan Laut Cina Selatan. Terdapat dalam BBC Online. Diakses pada 12 Februari 2017.

South China Sea is a Critical World Trade Route and a Potential Source of Hydrocarbons. EIA Overview. 07 Februari 2013. Terdapat dalam <http://www.eia.gov/countries/regions-topics.cfm?fips=sc>, diakses pada 12 Februari 2017.

Statement of Secretary Perfecto R. Yasay Jr: Praying for Success in the President's China Visit. Terdapat dalam <http://www.dfa.gov.ph/newsroom/phl-embassies-and-consulates-news/10695-statement-of-secretary-perfecto-r-yasay-jr-on-the-president-s-china-visit>. Diakses pada 30 Januari 2017.

Viray, Patricia Lourdes. *Yasay Reiterates: Duterte will not Deviate from Tribunal Ruling on South China Sea*. Terdapat dalam <http://www.philstar.com/headlines/2016/12/19/1654964/yasay-reiterates-duterte-will-not-deviate-tribunal-ruling-south-china-sea#dMI02yJcWUKvsHoY.99>. Diakses pada 31 Januari 2017.

Dokumen:

Inaugural Address of Presiden Rodrigo Roa Duterte. Delivered at The Riza Hall, Malacanang Palace, 30 Juni 2016.